

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan dibuat oleh manajemen sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan tersebut perlu diaudit karena ada kemungkinan laporan keuangan mengandung salah saji baik material maupun tidak material, disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, maka manajemen perusahaan memerlukan auditor yang bebas, tidak memihak kepada klien maupun pemakai laporan keuangan baik dalam pikiran maupun dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dijumpai dalam menjalankan pekerjaan auditnya, karena independensi adalah tulang punggung akuntan publik.

Independensi mencakup 3 aspek:

1. Independensi dalam kenyataan atau *independence in fact*, yang berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemui dalam auditnya.
2. Independensi penampilan atau *perceived independence* atau *independence in appearance*, yaitu independensi yang ditinjau dari sudut pandang pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dalam diri auditor.
3. Independensi dipandang dari sudut keahlian atau *independence in competence*, yang berarti seseorang dapat mempertimbangkan fakta dengan baik jika ia mempunyai keahlian mengenai audit atas fakta tersebut (Mulyadi & Kanaka, 1998:49)

Untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independen, akuntan publik harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Dengan demikian disamping akuntan harus benar-benar independen,

ia masih harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat, dengan adanya persepsi masyarakat terhadap independensi akan berdampak pada peningkatan kualitas profesi akuntan itu sendiri (Supriyono, 1988:20)

Dalam pekerjaannya, selain memberikan jasa *auditing*, kantor akuntan publik juga memberikan jasa non audit, misalnya jasa konsultasi manajemen kepada klien yang diperiksa laporan keuangannya. Jasa konsultasi manajemen yang dapat diberikan oleh suatu kantor akuntan publik meliputi: jasa penyusunan sistem akuntansi dan sistem komputer, sistem penyusunan dan pelaporan anggaran, pengendalian persediaan, studi kelayakan, rekrutmen staf dan karyawan, *review* operasional dan *improvement study*, pemberian bantuan dalam perencanaan strategik dan definisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem informasi (SPAP, 2001:15000.2)

Jasa konsultasi manajemen merupakan perwujudan yang wajar dari pemberian jasa *auditing*, karena melalui jasa audit, para auditor mendapatkan pengetahuan yang baik mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh klien (Supriyono, 1988:43). Tetapi bila suatu kantor akuntan publik dalam pelayanan jasa konsultasi manajemen memberikan keputusan terhadap manajemen klien yang diaudit, hal ini dianggap dapat berpengaruh terhadap independensi akuntan publik. Dalam hubungan dengan pemberian jasa ini, terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai pengaruh pemberian jasa konsultasi manajemen terhadap independensi akuntan publik.

Pendapat pertama menyatakan pekerjaan atau jasa konsultasi manajemen yang dilakukan mungkin akan mengganggu kebebasan bertindak dan berpendapat akuntan publik yang juga menjalankan pemeriksaan atau auditing (Tuanakotta, 1977:279). *Securities and Exchange Commission* (SEC) juga menyatakan bahwa pemberian jasa konsultasi manajemen dapat mempengaruhi independensi akuntan publik. Obyektivitas akan hilang karena akuntan publik akan bertindak untuk keuntungan pihak yang memberikan penugasan (Ponemon, 1995).

SEC kemudian mengeluarkan peraturan yang mengharuskan perusahaan *go publik* mengungkap secara terinci pemberian jasa profesional selain jasa audit oleh akuntan publik yang memeriksa perusahaan tersebut selama periode yang diperiksa, karena jasa konsultasi manajemen dianggap mempengaruhi independensi akuntan publik.

Akuntan publik diduga menjadi tidak independen karena akuntan publik memberikan saran-saran yang cenderung memihak kepada kepentingan kliennya yang kemudian menimbulkan hubungan yang sangat erat dengan manajemen klien sehingga akhirnya akuntan publik kehilangan independensinya di dalam melaksanakan pekerjaan audit. Akuntan publik merasa bahwa dengan pemberian jasa konsultasi manajemen berarti harga dirinya dipertaruhkan untuk keberhasilan kliennya. Dalam pemberian jasa tersebut terkadang akuntan publik diharuskan membuat keputusan tertentu untuk kliennya sehingga posisi akuntan publik menjadi tidak independen di dalam melaksanakan pemeriksaan (Supriyono, 1988:45)

Pendapat kedua dikemukakan oleh *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) bahwa pemberian jasa konsultasi manajemen yang dilakukan oleh kantor akuntan publik pada klien yang sama tidak merusak independensi akuntan publik dalam pemeriksaannya, asalkan jasa tersebut terbatas sebagai penasehat manajemen dan bukan sebagai pembuat keputusan (Supriyono, 1988:47). Obyektivitas dapat dipertahankan jika jasa non atestasi dilakukan oleh divisi yang terpisah dari divisi audit (Boynton & Kell, 1995:20).

Skandal Akuntansi di Amerika Serikat yang menimpa *Enron Corporation* memunculkan kembali pertentangan pendapat mengenai pengaruh jasa konsultasi manajemen terhadap independensi. *Enron Corp* sebagai perusahaan raksasa ke-7 terbesar dibidang energi dan perdagangan energi yang *listed* di *New York Stock Exchange* (NYSE), mencatat pertumbuhan penjualan dari US \$31 miliar dari tahun 1998 meningkat menjadi \$100 miliar pada tahun 2000. Laporan keuangan perusahaan tersebut dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh auditor, namun secara mengejutkan pada 2 Desember 2001 dinyatakan pailit.

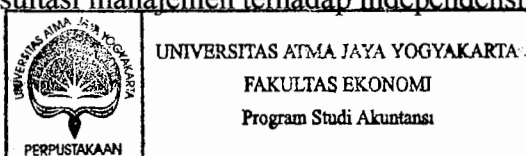
Masalah *Enron* berawal dari kesalahan manajemen dalam memberikan informasi mengenai perhitungan akuntansi mereka selama bertahun-tahun. Hal tersebut dapat terjadi karena: Pertama, adanya perekrutan kinerja laba sebesar \$1,2 milyar dan penyembunyian kewajiban (*off balancesheet*) dalam laporan keuangan selama 3 tahun. Rekrutasi tersebut dilakukan dengan membentuk *LJM Partnership* dimana direksi perusahaan tersebut dirangkap oleh beberapa direksi dari *Enron*, antara lain Jeffry Skilling dan Andy Fastow. Kedua, pemberian opsi saham secara *massive* (besar-besaran) kepada karyawan kunci dan komite audit

yang bertujuan meningkatkan kinerja dan nilai pasar perusahaan. Kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi atau mengamankan nilai saham yang menjadi haknya masing-masing. Ketiga, terjadinya konflik kepentingan dalam organisasi Arthur Andersen karena melakukan perangkapan pemberian jasa konsultasi yang lazimnya membela kepentingan kliennya, dan pemberian jasa audit yang mengharuskan adanya independensi.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi di Indonesia saat ini juga turut meninjau kembali norma pemeriksaan akuntansi yang mengatur tentang dualisme jasa akuntan publik yang berlaku bagi profesi akuntan publik agar tidak terjadi benturan kepentingan. Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002, membatasi jasa audit umum atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Dan diperjelas lagi dengan Peraturan Bapepam No.III.A.2, yang membatasi pemberian jasa sebuah KAP.

Peraturan tersebut dibuat karena pemerintah menduga bahwa pemberian jasa konsultasi manajemen, perpajakan atau penasihat investasi dan keuangan oleh kantor akuntan publik kepada klien yang sama akan mempengaruhi independensi. Oleh karena itu, suatu kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit umum tidak diperbolehkan memberikan jasa non atestasi kepada klien yang sama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengetahui persepsi auditor dan pemakai jasa atas pengaruh pemberian jasa konsultasi manajemen jasa konsultasi manajemen terhadap independensi akuntan publik.



I.2. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan di teliti adalah:

Apakah terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan klien atas pengaruh pemberian jasa konsultasi manajemen terhadap independensi akuntan publik?

I.3. Batasan Masalah

Penulisan ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Akuntan yang dimaksud adalah akuntan publik, yaitu orang yang memberikan jasa auditing profesional (auditor) dan jasa konsultasi manajemen kepada klien akuntan publik yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedang klien (pemakai jasa akuntan publik) adalah perusahaan yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pernah atau sedang menggunakan jasa konsultasi manajemen suatu kantor akuntan publik.
- b. Aspek independensi dibatasi pada independensi dalam kenyataan dan independensi penampilan akuntan publik.

I.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi antara auditor dan klien atas pengaruh pemberian jasa konsultasi manajemen terhadap independensi akuntan publik.

I.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi organisasi profesi (Ikatan Akuntan Indonesia), hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam mengeluarkan standar audit bagi akuntan publik khususnya yang berhubungan dengan pemberian jasa konsultasi manajemen, agar akuntan publik lebih mampu menjaga kredibilitas dan independensinya sehingga tidak memperburuk citra profesi.
2. Bagi klien atau pemakai jasa akuntan publik, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap kualitas jasa yang dihasilkan dan terhadap profesi akuntan sebagaimana yang mereka harapkan.

I.6 Hipotesa Penelitian

Penulisan skripsi ini didasarkan pada hipotesis sebagai berikut:

- H_0 : Tidak terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan klien atas pengaruh pemberian jasa konsultasi manajemen terhadap independensi akuntan publik.
- H_1 : Terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan klien atas pengaruh pemberian jasa konsultasi manajemen terhadap independensi akuntan publik.

I.7 Metodologi Penelitian

1. Metode pengambilan Sampel

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 8 kantor akuntan publik dengan 77 auditor yang memberikan jasa auditing dan jasa konsultasi manajemen dari 6 kantor akuntan publik yang menjadi sampel, serta 35 perusahaan yang pernah atau sedang menjadi pengguna jasa konsultasi manajemen suatu kantor akuntan publik. Dalam memilih sampel dari populasi yang ada, digunakan metode *purposive sampling* yakni metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu pertimbangan dengan mendasarkan pada tujuan penelitian (Hadi, 1991: 97).

2. Metode Pengumpulan data ✓

A. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari auditor yang pernah atau sedang memberikan jasa konsultasi manajemen dan klien (pemakai jasa) yang pernah atau sedang menjadi pengguna jasa konsultasi manajemen. Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara:

- Penyebaran Kuesioner

Pertanyaan dalam kuesioner dibagi dalam dua bagian. Bagian I bersifat bebas artinya responden hanya mengisi jawaban sesuai dengan keadaan responden, pertanyaan ini berfungsi untuk mengetahui identitas responden secara keseluruhan. Bagian II berisi

pernyataan-pernyataan yang bersifat tetap, artinya responden disediakan jawaban yang akan dipilih

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau keterangan yang dapat diperoleh dari buku-buku literature, artikel, dan bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Skala Pengukuran

Skala pengukuran menggunakan skala likert, yang menilai responden dengan skor tertentu, yaitu dari 1-5 (Lukas, 1992:153)

Penilaian atas pertanyaan yang sifatnya positif adalah:

Sangat Setuju (SS) diberi skor 5

Setuju (S) diberi skor 4

Ragu-ragu (R) diberi skor 3

Tidak Setuju (TS) diberi skor 2

Sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1

Sedangkan pertanyaan yang sifatnya negatif maka skor yang diberikan adalah skor dengan skala negatif yang terdiri dari:

Sangat Setuju (SS) diberi skor 1

Setuju (S) diberi skor 2

Ragu-ragu (R) diberi skor 3

Tidak Setuju (TS) diberi skor 4

Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 5

1.8 Metode Analisis Data

1. Membuat Daftar Tabulasi Hasil

Setelah seluruh kuesioner diterima, peneliti akan membuat daftar tabulasi hasil dengan memasukkan skor yang sudah ditentukan ke dalam setiap pertanyaan untuk diolah lebih lanjut.

2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Pengujian Validitas (kesahihan butir) dilakukan untuk mengetahui apakah alat penelitian telah benar-benar mencerminkan variabel yang diukur. Sedangkan pengujian Reliabilitas (keandalan butir) dilakukan untuk mengetahui konsistensi atau keandalan butir.

3. Analisis *Independent Sample t-test*

analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis mengenai perbedaan dua rata-rata suatu populasi.

Langkah uji-t:

a. Menentukan H_0 dan H_1

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : tidak terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan klien atas pengaruh pemberian jasa konsultasi manajemen terhadap independensi akuntan publik.

H_1 : terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan klien atas pengaruh pemberian jasa konsultasi manajemen terhadap independensi akuntan publik

Pengujian hipotesis menggunakan pengujian dua arah, yakni untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan antara dua proporsi.

b. Penentuan tingkat nyata

Tingkat nyata atau *level of significance* adalah probabilitas menolak

H_0 yang benar. Tingkat nyata yang digunakan adalah sebesar 5%.

c. Menentukan nilai uji statistik

Nilai statistik uji-t dihitung dengan rumus:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left[\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right]}}$$

Keterangan:

\bar{X}_1 = rata-rata populasi 1

\bar{X}_2 = rata-rata populasi 2

N_1 = jumlah populasi 1

N_2 = jumlah populasi 2

S_1^2 = deviasi standar populasi 1

S_2^2 = deviasi standar populasi 2

d. Membandingkan signifikan uji-t dengan tingkat nyata (α)

e. Mengambil kesimpulan

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesa, metodologi penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK

Untuk memperoleh dasar dan pedoman arah dalam melakukan pembahasan pada bab IV, dalam bab ini akan dijelaskan landasan teori mengenai jasa konsultasi manajemen dan pengaruhnya terhadap independensi akuntan publik. Dasar teori tersebut akan dibagi dalam 5 sub bab yang meliputi penjelasan mengenai kantor akuntan publik, definisi akuntan publik, pengertian dan arti penting independensi bagi akuntan publik secara umum, definisi klien (pemakai jasa) dan definisi persepsi. Disamping itu akan diuraikan tentang definisi jasa konsultasi manajemen, pengaruh jasa konsultasi manajemen terhadap independensi, dan standar jasa konsultasi manajemen.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai bentuk penelitian, daerah penelitian, populasi penelitian dan data mengenai sampel, metode pengumpulan data, teknik pengukuran data, metode pengujian instrumen dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA

Analisis data berisi tentang proses penganalisisan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan. Metode analisis data untuk mengetahui mengenai ada tidaknya perbedaan persepsi antara auditor dan klien atas pengaruh pemberian jasa konsultasi manajemen terhadap independensi akuntan publik dengan menggunakan analisis *independent sample t-test*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Atas hasil pembahasan dan analisis pada bab keempat, maka akan diberikan kesimpulan dan saran.